

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

Diyan Putra Rizki
Universitas Negeri Surabaya
diyanrizki@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to know the government internal control system, information technology usage, and effect of human resource capacity towards the quality of financial statement of Mojokerto. This research use quantitative approach using primary data obtained from spreading questionnaires. Sample selected is 123 employees who work as head officer and staff of accounting / financial administration sub section in 41 SKPD of Mojokerto. The research uses multiple linier regression analysis on SPSS 21. The result shows that government internal control system, informasion tecnology usage, and human resource capacity affect positively towards the quality of financial statement of Mojokerto

Key Word: *capacity, government, quality.*

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah suatu kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian dan kemudian penganalisisan yang dipaparkan dalam sebuah laporan transaksi keuangan yang digunakan atau disuguhkan oleh organisasi publik untuk menyediakan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak yang memerlukannya yang digunakan sebagai landasan sebuah pengambilan keputusan. Berbicara mengenai laporan keuangan organisasi sektor publik yang mempunyai tujuan untuk dipaparkan kepada publik maka laporan keuangan tersebut harus bersifat transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Perkembangan organisasi sektor publik saat ini khususnya di Indonesia adalah permintaan akan akuntabilitas yang menggebu atas organisasi-organisasi publik baik organisasi dalam cakupan pusat ataupun organisasi dalam cakupan daerah. Pengertian akuntabilitas adalah sebuah bentuk tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat dan apa yang telah diperoleh dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dari suatu organisasi, pertanggung jawabannya dilakukan dengan bentuk suatu laporan keuangan.

Informasi berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sangat diandalkan banyak pihak sebagai landasan agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan, maka dari itu laporan keuangan harus berguna untuk pemakainya.

Berbicara mengenai informasi yang bermanfaat serta berguna bagi para penggunanya berarti sama halnya bahwa informasi harus memiliki sebuah nilai (Suwardjono, 2005). Informasi yang berguna dan bermanfaat apabila pembuatan informasi tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan dan sesuai dengan landasan yang ditetapkan dan kemudian informasi tersebut bisa digunakan dan bisa dengan mudah dimengerti sebagaimana mestinya oleh pemakainya.

Pengelolaan laporan keuangan dipemerintahan daerah tidak luput dari peran para karyawan yang secara langsung melakukan atau melaksanakan proses dari pembuatan laporan keuangan tersebut, jadi pegawai dikatakan sebagai sumber daya manusia harus mempunyai kapasitas yang baik dan sesuai dengan bidang apa yang mereka lakukan. Kemudian apabila sumberdaya manusia yang dipadukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang baik maka dapat dibayangkan bagaimana lebih mudahnya dan efisiennya proses pembuatan

laporan keuangan tersebut, akan tetapi apabila yang terjadi adalah sumberdaya manusia tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, maka penggunaan teknologi informasi malah akan memperkeruh kerjaan para karyawan. Oleh karena itu butuh pembelajaran serta sosialisai yang mendalam untuk penggunaan pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, teknologi informasi serta sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian diharapkan mampu digeneralisasi untuk seluruh SKPD di daerah Kabupaten Mojokerto agar terciptanya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan kualitas kuantitatif laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* mempunyai artian apabila semua *stakeholder* berhak untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas organisasi yang melibatkan mereka (Yi *et al.*, 2011). Teori ini memberikan ulasan kalau organisasi akan menyampaikan secara transparan dalam pengungkapan informasi mengenai kinerja, soisal dan intelegensi mereka melebihi atau diatas permintaan dari *stakeholder* agar memenuhi arti atau ungkapan sesungguhnya yang lebih diakui oleh *stakeholder*.

Technology Acceptence Model (TAM)

Technology Acceptence Model (TAM) adalah suatu teori yang dibuat Davis (1986) mengenai pemaparan bagaimana pemanfaatan teknologi yang baik yang

akan dimanfaatkan oleh pengguna teknologi dan dapat memberikan manfaat yang baik pula untuk penggunaannya, menurut Davis kegiatan penerimaan teknologi informasi bermula dari sebuah persepsi mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi (*ease to use*) serta manfaat (*usefulness*) dan akhirnya berdampak pada tujuan yang menguntungkan.

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan adalah suatu bentuk penyampaian pihak pemerintahan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pihak lain, pihak lain yang dimaksudkan adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai gambaran bagaimana keadaan keuangan pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan seharusnya berdasarkan PP Tahun 2010 No. 71 yaitu mengatur mengenai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP). Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah bertujuan untuk dijadikan ukuran normatif yang perlu dipaparkan atau yang perlu tersampaikan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat tercapainya tujuan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pencapaian tujuan pengelolaan pelaporan keuangan negara yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan maka sudah seharusnya para pimpinan lembaga, bupati atau walikota atau bahkan gubernur melakukan pengendalian atas seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, hal tersebut telah dipaparkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Jenis SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Penilaian resiko, Lingkungan pengendalian, Kegiatan pengendalian, Pemantauan pengendalian intern, Informasi dan komunikasi.

Sistem pengendalian intern pemerintah ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan keamanan guna terbentuknya efisiensi serta efektivitas dari seluruh kegiatan pemerintah negara. Tidak hanya itu akan tetapi tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan yang diterapkan serta memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu tujuan memaksimalkan fungsi dari suatu kemajuan teknologi informasi dimana memanfaatkan teknologi informasi itu termasuk adanya pengolahan informasi, pengolahan data, tatakelola manajemen dan tatakelola kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini bertujuan untuk supaya pelayanan publik dengan mudah dan murah dapat diakses oleh seluruh individu atau organisasi yang memerlukan. Selain memanfaatkan komputer teknologi informasi juga mengarah pada sebuah jaringan internet, jaringan internet dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk masyarakat umum, salah satunya yakni dapat memberi kemudahan masyarakat untuk mengakses situs resmi pemerintahan daerah guna memberi informasi mengenai profil pemerintah daerah serta kegiatan-kegiatan terbaru yang telah terlaksana dan juga yang terpenting adalah mengenai informasi kondisi keuangan pemerintah.

Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumberdaya manusia dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan perorangan dalam berkerja baik dengan tim atau individu, di mana kemampuan

itu menjadi ukuran dari perorangan itu sendiri. Kapasitas sumber daya manusia juga bisa dikatakan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menjalankan sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan oleh organisasi dan bertujuan untuk pencapaian visi dan misi. Kapasitas bisa diukur sebagai kesanggupan untuk melakukan kerja, dan kemudian menghasilkan sebuah pengeluaran dan manfaat.

Sumber daya manusia yang ada seharusnya memenuhi persyaratan yang sebagaimana mestinya agar tidak terjadi *human error* dalam penyusunan pelaporan keuangan. Kapasitas sumber daya manusia yang dipilih atau digunakan seharusnya sumber daya manusia yang memadai atau yang memiliki tipe dari manusia yang berpengetahuan (*knowledge*), berketerampilan (*skill*), dan berkemampuan (*ability*).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Fraud atau sebuah kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang masih banyak terdapat di dalam sebuah laporan keuangan yang ditemukan pada saat audit diadakan, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan belum dapat dikatakan laporan keuangan yang mempunyai karakteristik/nilai informasi. Apabila dihubungkan dengan penjabaran mengenai apa itu sistem pengendalian intern akuntansi, maka penyebab dari kesalahan atau *fraud* tersebut adalah suatu kesalahan yang dikarenakan bersangkutan dengan

lemahnya pengendalian intern akuntansi yang diterapkan. Dari uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan sebuah hipotesis, yakni:

H₁: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bukan hanya dalam organisasi bisnis perkembangan teknologi informasi itu dimanfaatkan dan dibutuhkan tetapi dalam organisasi sektor publik pun perkembangan teknologi sangat dibutuhkan. Dalam PP Tahun 2005 No.56 mengenai informasi keuangan daerah menjelaskan, agar terlaksanakannya proses pengelolaan yang searah dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah wajib memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun keuangan daerah, serta menyalurkan informasi mengenai kondisi keuangan daerah untuk masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi yang berupa komputer dan jaringan akan membuat tugas lebih cepat diselesaikan dan lebih dalam hal keakuratan dan ketepatannya. Penggunaan dan pemanfaatan dengan cara yang benar juga dapat meminimalis terjadinya kesalahan. Dari uraian tersebut penulis menduga adanya hubungan antar pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, maka disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan TI memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005) menunjukkan bahwa kebanyakan pegawai yang bekerja bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, belum jelasnya mengenai pembagian tugas, serta belum dilakukannya sosialisasi atau pembelajaran untuk memastikan sistem akuntansi terlaksana dengan baik (Mulyadi, 2010). Apabila sistem akuntansi yang diterapkan dan dilaksanakan dilakukan dengan baik akan tetapi sumber daya manusianya tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan mengerjakannya, maka bukan menjadikan sistem itu baik justru akan membuat pekerjaan menjadi kacau dalam pelaksanaan fungsi dan sistem akuntansi yang telah diterapkan, akhirnya sebuah laporan keuangan yang akan dijadikan sebuah informasi untuk menganalisa sebuah keadaan dalam organisasi tidak akan dapat dikatakan sebagai informasi yang transparan dan akuntabilitas. dari uraian yang penulis jabarkan, penulis menduga ada hubungan antar sumberdaya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kemudian hubungan itu menghasilkan hipotesis:

H₃: Kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif adalah metode yang dipilih untuk penelitian ini. Terdapat dua variabel pada penelitian ini yakni, variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yakni kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk variabel independen pada penelitian ini adalah

kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini berjenis penelitian yang kausal yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan berupa sebab dan akibat.

Pengukuran yang digunakan untuk keempat variabel dipenelitian ini menggunakan skala likert. Sugiyono (2014:93) menyimpulkan bahwa Skala Likert diperuntukan mengatur pendapat, sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan:

Nilai 1 = (STS)Sangat Tidak Setuju

Nilai 2 = (TS)Tidak Setuju

Nilai 3 = (KS)Kurang Setuju

Nilai 4 = (S)Setuju

Nilai 5 = (SS)Sangat Setuju

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dipenelitian ini yakni data primer. Menurut sugiyono (2012 :137) data primer merupakan data yang diambil dari sumber secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditentukan dan secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pernyataan penelitian ini.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner sejumlah 123 untuk bagian akuntansi / tata usaha keuangan di 41 SKPD Kabupaten Mojokerto.

Statistik deskriptif tiap variabel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

| | Mean | Std. Deviation | N |
|---------------------------------|-------|----------------|-----|
| Kualitas Laporan Keuangan | 29.58 | 2.123 | 123 |
| Kapasitas Sumber Daya Manusia | 34.23 | 2.697 | 123 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 19.14 | 1.977 | 123 |
| Sistem Pengendalian Intern | 26.24 | 2.352 | 123 |

Validitas dan Realibilitas

Berdasarkan hasil uji Validitas terhadap setiap pertanyaan pada tiap variabel, dinyatakan bahwa semua pertanyaan memiliki nilai correlations di atas 0,30 dan lalu nilai *Correlated item–Total Correlation* disandingkan dengan hasil hitungan r_{tabel} dinyatakan semua item pertanyaan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang artinya semua item pertanyaan telah valid.

Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa besaran *conbrach's Alpha* untuk setiap variabel pengukur memiliki nilai di atas 0,60. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner yang digunakan dalam

penelitian ini sudah menunjukkan hasil yang reliabel yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut:

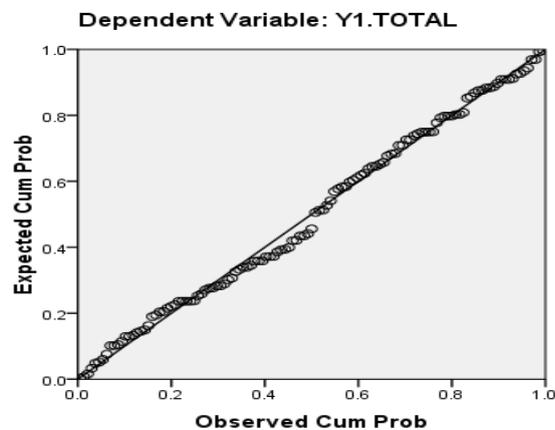
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Nilai Alpha | Keterangan |
|--|-------------|------------|
| Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) | 0,628 | Reliabel |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) | 0,668 | Reliabel |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) | 0,631 | Reliabel |
| Kualitas Laporan Keuangan (Y) | 0,626 | Reliabel |

Normalitas

Dengan melihat grafis plot distribusi normal hasil uji normalitas pada penelitian ini dilakukan. Variable dinyatakan normal apabila gambar titik data yang menyebar di sekitaran garis digonal dan penyebaran titik data searah mengikuti garis diagonal, jadi dapat dinyatakan bahwa kenormalitasan dalam regresi penelitian ini terpenuhi. Berikut grafik uji normalitas:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Hasil uji normalitas

Multikolinieritas

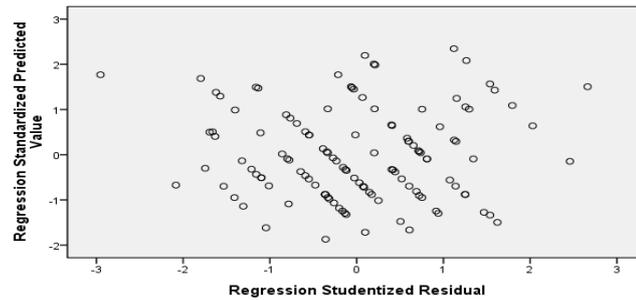
Uji multikolinieritas ditunjukkan melalui nilai VIF dan nilai *tolerance*. Hasil uji didalam penelitian menjelaskan nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 pada setiap variabel independennya. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dipaparkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (constant) | | |
| Kapasitas sumber daya manusia (X1) | .853 | 1.172 |
| TI (X2) | .863 | 1.159 |
| Pengendalian pemerintah (X3) intern | .871 | 1.148 |

Heteroskedastisitas

Dengan melihat grafik scatterplot uji heteroskedastisitas dilakukan dalam penelitian ini, dan hasilnya adalah memberikan hasil bahwa penyebaran pola menyebar seimbang antara nilai Y dan tidak memiliki pola tertentu dalam penyebarannya. Dari hasil tersebut maka ditarik sebuah kesimpulan jika penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji dari scattterplot:



Gambar 2. Scatterplot
Dependent Variable: Kualias laporan keuangan (Y)

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan agar dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel dalam penelitian ini. Dengan SPSS diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. error | Beta |
| 1. (Constant) | 8.541 | 2.722 | |
| Kapasitas sumber daya manusia (X1) | .207 | .070 | .236 |
| Pemanfaatan teknologi informasi (X2) | .309 | .095 | .259 |
| Sistem pengendalian intern (X3) | .311 | .080 | .310 |

Jadi persamaan regresi yang didapat dari tabel diatas adalah:

$$Y = 8,541 + 0,207(X1) + 0,309(X2) + 0,311(X3)$$

Uji F (Simultan)

Uji simultan digunakan untuk menjabarkan apakah setiap variabel independen yang digunakan dipenelitian ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa memiliki pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun data hasil pengujian uji F disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji F

| Model | Sum of Square | Df | Mean Square | F | Sig. |
|---------------|---------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1. Regression | 235.369 | 3 | 78.456 | 20.986 | .000 ^a |
| Residual | 444.891 | 119 | 3.739 | | |
| Total | 680.260 | 122 | | | |

Uji T (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menjabarkan apakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Semua hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan melakukan uji t. Uji t digunakan dengan cara membandingkan taraf signifikansi. Jika taraf signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis yang diajukan diterima

atau dikatakan signifikansi. Begitu pula dengan sebaliknya. Berikut hasil analisa menggunakan SPSS seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji T

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | std. Error | Beta | | |
| 1. (Constant) | 8.541 | 2.722 | | 3.138 | .002 |
| Kapasitas sumber daya manusia (X1) | .207 | .070 | .236 | 2.939 | .004 |
| Pemanfaatan teknologi informasi (X2) | .309 | .095 | .259 | 3.243 | .002 |
| Sistem pengendalian intern (X3) | .311 | .080 | .310 | 3.900 | .000 |

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Mojokerto. Artinya bahwa, semakin baik pelaksanaan unsur SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Artinya bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, sama dengan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
3. sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Artinya bahwa semakin bagus kapasitas sumberdaya manusia sama dengan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian serta beberapa kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diutarakan melalui penelitian ini adalah :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto harus terus meningkatkan pelatihan ketenaga kerjaan, sosialisai mengenai sistem akuntansi, perawatan teknologi informasi, serta memperketat sistematika dari pengendalian internal di pemerintahan agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dimata publik dan tetap mendapatkan hasil WTP ketika diaudit oleh BPK.
2. Bagi peneliti lain agar melengkapi metode survei melalui kuisoner dengan wawancara agar dapat meningkatkan atau memaksimalkan sikap atas keseriusan serta kepedulian responden untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bpk.go.id>. –Di akses 03 Pebruari 2016

<http://www.mojokertokab.go.id/>. –diakses 03 Pebruari 2016

Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern. Jakarta : Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta : Sekretariat Negara

Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Edisi III). Yogyakarta: BPFE.